



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT

NOMOR W.33-16.HN.01.01 TAHUN 2023
TENTANG

KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa demi efektifnya penyelenggaraan kegiatan Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa anggota kelompok kerja analisis dan evaluasi produk hukum daerah merupakan aparatur sipil negara yang berasal dari unsur internal dan eksternal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat yang memiliki kompetensi dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan kegiatan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Kelompok Kerja Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1473);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

6. Surat Kepala Pusat Analisis dan evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional PHN.3-HN.01.01-03 tanggal 27 Januari 2023 hal Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat sebagaimana termuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berasal dari dalam dan luar lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
- KETIGA : Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertugas :
1. melaksanakan seluruh tahapan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ;
2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Anggota kelompok kerja yang berasal dari luar lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, diberikan honor sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2022 SP-DIPA- 013.10.2.667799/2023 Tanggal 12 November 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal 10 Mei 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Nomor W.33-16.HN.01.01. Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN KELOMPOK KERJA
1.	Parlindungan, S.H.,M.H.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat	Penanggung jawab
2.	Rahendro Jati, S.H., M.H.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Ketua
3.	Agustina Dayaleluni, S.H., M.H.	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Sekretaris
4.	Arpan Rinaldy Tambila Barre S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undnagan Ahli Pertama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Anggota
5.	Munawir, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Anggota
6.	Dr. Irsyadi Ramadhany, S.H., M.H	Wakil Ketua DPW Sulawesi Barat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara	Anggota
7.	Dr. Muhammad Al Habsy Ahmad, S.H., M.H.	Wakil Dekan I Fakultas Hukum Tomakaka Mamuju	Anggota
8.	Afrizal, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Yuswanto. SE	Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Madya Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Rina, S.H., M.H.	Analisis Hukum Pertama Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

11.	Astuti Toding, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Anggota
12.	Fahriani, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Anggota
13.	Victor Oliver, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Anggota
14.	Ahmadi, S.Ip.	Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat	Anggota



Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal 10 Mei 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002

